

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM DI POLSEK UJUNG PANDANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

WARITS DEEN MUHAMMAD WAHYU

NIM : 10200114254

JURUSAN HUKUM PIDANA & KETATANEGARAAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Warits Deen Muhammad Wahyu
NIM : 10200114254
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene, 05 November 1996
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. Andi Abu Bakar No. 3, Kel. Rijang Pittu, Kec.
Maritenggae, Kab. Sidenreng Rappang
Judul : Perlindungan Hukum Hak-hak Tersangka Dalam
Proses Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Hukum
Pidana Islam di Polsek Ujung Pandang.

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 November 2018

Penulis



WARITS DEEN MUHAMMAD WAHYU

NIM. 10200114254

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam di Polsek Ujung Pandang”, yang disusun oleh Warits Deen Muhammad Wahyu, NIM: 10200114254, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 M, bertepatan 14 Rabi’ul-Awwal 1440 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Samata, 23 November 2018 M

15 Rabi’ul-Awwal 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Kurniati, M.H.I.	(.....)
Munaqisy I	: Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Ashar Sinilele, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Halimah B, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Alimuddin, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

Nip: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehendak Allah swt atas segala nikmat-Nya, baik nikmat kesehatan maupun kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam di Polsek Ujung Pandang”** yang merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menghamparkan permadani-permadani Islam.

Membuat skripsi bukanlah hal yang mudah dan ringan untuk dilakukan, melainkan tugas yang berat dan membutuhkan banyak pengorbanan baik tenaga, biaya dan waktu. Penulisan skripsi ini bukanlah merupakan hasil tunggal, melainkan tidak terlepas dari pemikiran dan budi baik banyak orang. Untuk itu terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda **Nursiah Roe** dan Ayahanda **Syahrudin Sanusi** yang telah mencurahkan segenap doa, restu, kasih sayang serta segala bentuk pengorbanannya yang tidak dapat dibayar dengan apapun. Apa yang diberikan saat ini hanyalah segelintir ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tidak dapat terbendung lagi dan sesungguhnya penulis tidak akan pernah mampu untuk membalas kasih sayang yang telah ayah dan ibu berikan.

Begitu pula saudaraku, adik pertama **Nadratannaimi** ,adik kedua **Nurul Khalishah**, adik ketiga **Alfiah Rufaidah**, adik keempat **Muh. Mujtaba Abqari** yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat dalam menyusun skripsi ini dengan penuh kasih sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan serta

doa yang tulus demi kesuksesan selama pelaksanaan proses kuliah dan penyelesaian skripsi ini. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun doa. Karena itu terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababari, M.Si.** Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil rektor, dan seluruh staff UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang maksimal.
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu **Dra. Nila Sastrawati, M.Si.** dan Ibu **Dr. Kurniati, M.HI.** Masing-masing selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
4. Ibu **Dr. Hj. Halimah B, M.Ag.** dan Bapak **Dr. Alimuddin, M.Ag.** Masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi, serta memberikan banyak pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pembahasan ini.
5. Bapak **Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D.** dan Bapak **Ashar Sinilele, S.H., M.H.** Masing-masing selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan banyak sekali masukan dan saran sebagai bahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Staff Pegawai yang telah membantu dalam kelancaran akademik.
7. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta staffnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang di butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepala Kepolisian Sektor Ujung Pandang serta jajaran pengurus yang membantu dan memberikan izin dalam rangka kegiatan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan.
9. Seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Teman-teman Angkatan HPK 2014 , dan khususnya HPK E atas kebersamaannya selama ini, karena kalian, sehingga mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Sahabat-sahabat **Muh. Fadel Syam, Muh. Arif Fahri, Muh. Chalid Abdul Aziz, Muh. Aswan, S.H., Faizal Assidiq, Ahmad Ariyanto, Kamaruddin, Mustakim, Tajuddin Salamon, Ryan Kurniawan, Syamsuddin, A.M Alif**, yang selalu mendoakan, menghibur, memberikan support, bahkan mengejek untuk memberi motivasi serta mewarnai kehidupan penulis dari hingga sekarang.

11. Seluruh teman-teman KKN Angkatan 58 Erelembang Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa. **Julfikar, Harullah Ali, Muliana, Astuti, Kurnia, Mawaddah**, yang pernah mengisi hari-hari penulis selama 45 Hari.
12. Teman-teman pejuang Desember (**Musdalifa Umar , Sry Wahyuni, Arwiny Haerun, MH. Fathurachman**), yang senantiasa memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Semoga Allah swt. Senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya.

Upaya penulisan skripsi ini telah dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu mohon saran atau kritikan dari pembaca untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin.

Samata, 22 November 2018

Penulis



Warits Deeh Muhammad Wahyu

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN TEORETIS	19
A. Hak dan Kedudukan HAM di Indonesia	19
1. Pengertian Hak dan Hak Asasi Manusia	19
2. Kedudukan HAM dalam Sistem Hukum Nasional	20
B. Tersangka dan Hak Tersangka	21
1. Pengertian Tersangka	21
2. Golongan Tersangka	22
3. Hak Tersangka.....	22
C. Penyidikan dan Tahap Penyidikan	32
1. Pengertian Penyidikan	32
2. Kewenangan Penyelidik dan Penyidik	33
3. Tahapan Penyidikan	35
D. Hak Tersangka dalam Hukum Pidana Islam	36
1. Hak Untuk Hidup	38

2. Hak Kemerdekaan	39
3. Hak Atas Penghargaan	41
4. Hak Memiliki	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Data	45
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Instrumen Penelitian.....	46
F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data.....	46
G. Pengajuan Keabsahan Data	47
BAB IV PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Letak Geografis Polsek Ujung Pandang.....	49
2. Visi dan Misi	50
3. Struktur dan Susunan Organisasi	51
B. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana di Polsek Ujung Pandang	53
C. Pelanggaran Aparat Kepolisian di Polsek Ujung Pandang Terhadap Hak Tersangka dalam Penyidikan.....	62
1. Pelanggaran Administratif dan Prosedural.....	62
2. Pelanggaran Terhadap Keamanan dan Kebebasan Jiwa-Raga.....	66
D. Perlindungan Hak Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam	68
BAB V PENUTUP.....	77

A. Kesimpulan.....	77
B. Implikasi Penelitian.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
ؤَ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْحَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نُعْمَ : *nu‘ima*
عُدُّوْ : *aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)
عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبَلَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمُورٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf* ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِالله dīnullāh دِينُ اللهِ billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

NAMA : WARITS DEEN MUHAMMAD WAHYU
NIM : 10200114254
JURUSAN : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
**JUDUL : Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses
Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam
di Polsek Ujung Pandang.**

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum hak tersangka oleh aparat kepolisian (Penyidik) pada proses penyidikan tindak pidana. Adapun sub-sub masalah terdiri atas 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka dalam penyidikan tindak pidana?, 2) bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran aparat kepolisian terhadap hak tersangka dalam penyidikan?, 3) bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana dalam hukum pidana Islam?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yuridis empiris dan normatif syar'i berdasarkan dari al-Qur'an dan al-Hadist serta pendapat ulama. Sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder dari buku, dokumen resmi, dan jurnal. Pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan metode identifikasi data, koding data, dan editing data.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dan menarik kesimpulan bahwa 1) perlindungan hukum hak tersangka di Polsek Ujung Pandang Makassar belum terlaksana secara optimal, karena tidak semua tersangka memperoleh haknya saat penyidikan maupun penahanan. 2) aparat penegak hukum seringkali menggunakan tindakan paksaan dan tindakan kekerasan untuk memudahkan penyidikan dan mengumpulkan alat bukti seperti keterangan tersangka. 3) dalam hukum pidana Islam, perlindungan hak asasi tersangka maupun terdakwa diberikan pada semua tahapan proses yang dilalui oleh tersangka atau terdakwa.

Adapun Implikasi dari penelitian ini adalah 1) diharapkan pejabat yang berwenang menjelaskan hak-hak tersangka sebelum diadakan pemeriksaan, agar hak tersangka terlindungi ditingkat penyidikan dan berjalan dengan optimal. 2) perlu adanya kebijakan untuk menggali dan menghormati nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, terutama hukum Islam sebagai agama yang mayoritas dianut di Indonesia sebagai bahan untuk pembentukan hukum yang lebih manusiawi dan menghargai HAM.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak berakhirnya peran dingin, ditandai dengan runtuhnya salah satu negara adikuasa terbesar di dunia yaitu Uni Soviet, maka isu global beralih dari komunisme dan pertentangan antara blok Barat dan blok Timur, ke masalah baru yaitu masalah hak asasi manusia, masalah lingkungan, dan masalah liberalisme perdagangan. Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak terlepas dalombang isu hak asasi manusia yang melanda hampir semua negara di dunia ini.¹

Munculnya berbagai tindakan yang mengekang dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, mendorong lahirnya kesadaran global yang memberikan apresiasi positif terhadap pengakuan dan perlindungan HAM. Kesadaran ini dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa pengakuan dan perlindungan HAM hanya dapat diwujudkan secara maksimal dan optimal melalui kerja sama internasional.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Bangunan-bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan benalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apa pun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya.²

¹Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indoensia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 9.

²Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia* (Makassar: Prenada Media, 2009), h. ix.

Sebenarnya masalah hak asasi manusia bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat internasional, karena isu hak asasi manusia sudah mulai dilontarkan semenjak lahirnya *Magna Carta* (Piagam Besar) di Inggris pada tahun 1215, *Magna Carta* dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia, dan dianggap sebagai *tonggak perjuangan* lahirnya hak asasi manusia sampai lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, yaitu “*Universal Declaration of Human Right*” pada tanggal 10 Desember 1948.

Perlu diketahui bersama bahwa jauh sebelum lahirnya *Magna Carta* (Piagam Besar) di Inggris tahun 1215, sebenarnya di dunia Islam telah terlebih dahulu ada suatu piagam tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan “*Piagam Madinah*” di Madinah pada tahun 622, yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi bagi penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai suku dan agama.

Usaha nyata dalam menggalang kesadaran global untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan HAM, terwujud setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan “*Universal Declaration of Human Right*” (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) pada 10 Desember 1948 di Kota Paris. Deklarasi ini memuat hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini meliputi, hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi (pasal 3), larangan perbudakan (pasal 4), larangan penganiayaan (pasal 5), larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (pasal 9), hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur (pasal 10), hak atas kebebasan bergerak (pasal 13), hak atas harta benda (pasal 17), hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani, dan beragama (pasal 19), hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran (pasal 19), hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 20), dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan (pasal 21).³

³Peter R. Baecher, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 6-7.

Hak asasi manusia yang dimuat dalam deklarasi umum hak asasi manusia merupakan kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Secara tegas dan jelas mengingatkan kepada siapa pun agar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Dasar yang paling relevan digunakan dalam mengungkap konsep ini adalah bahwa manusia dilahirkan dengan derajat dan kehormatan yang sama. Misalnya QS. al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴

Ayat ini menekankan perlunya manusia bertakwa, karena sarana takwa merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Di ayat lain Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dari asal yang sama dan kepada-Nyalah semua manusia harus taat dan patuh. Ayat yang sering dijadikan rujukan dalam membahas asas persamaan manusia adalah QS. an-Nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 745.

dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁵

Substansi ayat di atas mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih antara sesama manusia. Dengan dasar persamaan penciptaan membawa dampak pemahaman persamaan manusia. Meskipun dipahami secara faktual bahwa manusia berbeda antara satu dengan lainnya dalam hal jenis kelamin, warna kulit, pola pikir, dan selainnya, akan tetapi dari segi kemanusiaan seluruh manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama.

Sebagai sebuah deklarasi baru yang mengikat secara moral dan belum mengikat secara yuridis. Akan tetapi, sekalipun tidak mengikat secara yuridis, namun *Declaration of Human Right* mempunyai pengaruh sosial, politik, dan edukatif yang sangat besar. Deklarasi ini melambangkan *commitment* moral dunia internasional pada norma-norma dan hak asasi. Pengaruh moral dan politik ini terbukti dalam keputusan hakim, undang-undang atau undang-undang dasar, apalagi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁶

Perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, sepanjang sejarah umat manusia selalu mengalami pasang surut. Puncak keberhasilan perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ditandai dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan “*Universal Declaration of Human Right*” sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Semenjak itu masalah hak asasi manusia betul-betul telah menjadi perhatian dunia, terlebih-lebih sesudah berakhirnya perang dingin, terutama di negara-negara maju. Namun demikian, pelanggaran terhadap hak asasi manusia tetap saja terjadi tidak

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.99.

⁶Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) h. 24.

hanya di negara-negara berkembang, tetapi ironisnya di negara-negara maju yang menanamkan dirinya pendekar hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia itu masih saja terjadi, seperti di Amerika Serikat, Bosnia, Kosovo, dan lain-lain.

Apabila kita perhatikan di negara kita sendiri Indonesia, pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ternyata telah cukup banyak diberikan, baik yang ditemukan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ratifikasi oleh pemerintah Indonesia terhadap kovenan dan konvensi tidak hanya karena desakan dunia internasional, tatapi hal ini terkait dengan amanah para pendiri negara yang dituangkan dalam Sila II Pancasila yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Makna yang terkandung dalam Sila II Pancasila ialah pengakuan terhadap adanya martabat manusia dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.⁷

Indonesia telah menandatangani Konvensi Menentang Penyiksaan pada 23 Oktober 1985. Kemudian Indonesia meratifikasi konvensi itu pada 28 September 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Konvensi Menentang Penyiksaan dalam Pasal 9 (1) ICCPR menentukan, tidak seorang pun dapat dikenai penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang. Walaupun penangkapan dan penahanan dibenarkan secara hukum, tetapi hal itu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Kata “sewenag-wenang” dipahami mengandung unsur ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian (*unpredictability*), ketidakwajaran (*unreasonableness*), ketidakteraturan (*unconciuousness*), dan ketidakseimbangan (*disproporsionality*). Hal spesifik

⁷Darji Darmodihardjo, *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 1991), h. 54.

dilakukannya penahanan penahanan tidak boleh diskriminatif, harus dibenarkan sebagaimana mestinya dan berimbang dengan mengingat keadaan dan kasusnya.⁸

Lebih lanjut Pasal 10 (1) ICCPR menekankan, agar semua orang yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka. Penekanan ini tidak lepas dari status para tahanan sebagai orang-orang yang belum dihukum yang statusnya berbeda dengan orang-orang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Oleh karena itu, walaupun mereka diduga telah melakukan tindakan pidana, akan tetapi harkat dan martabatnya sebagai manusia tetap harus dilindungi.⁹

Perlakuan manusiawi berlaku kepada semua tahanan, termasuk tahanan anak-anak dan perempuan. Khusus untuk tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa dan secepatnya diajukan ke pengadilan. Tujuan ketentuan ini yaitu untuk menjamin bahwa penahanan sebelum proses peradilan, untuk anak diupayakan sesingkat mungkin. Konvensi Hak Anak menegaskan larangan penyiksaan dan penganiayaan anak dilarang (serta hukuman mati dan hukuman badan), larangan mencabut kebebasan anak dengan melawan hukum dan semena-mena, anak-anak yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi.

Sama halnya dengan tahanan anak, tahanan perempuan juga harus mendapat perlakuan khusus menurut instrumen HAM internasional. Perlindungan khusus kepada tahanan perempuan bukan merupakan bentuk diskriminasi perlakuan, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk melindungi tahanan perempuan dari perlakuan tidak manusiawi, seperti pelecehan seksual, perlakuan terhadap perempuan hamil, dan menyusui. Berkaitan dengan akomodasi tahanan perempuan, mengharuskan kategori tahanan yang berbeda ditempatkan di lembaga atau bagian lembaga yang

⁸C. de Rover, *To Serve and To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 396.

⁹Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014), h. 11.

terpisah, dengan mempertimbangkan jenis kelamin, usia, catatan kejahatan mereka, mempertimbangkan aturan bagi penahanan mereka, dan perlakuan yang mereka perlukan.¹⁰

Sifat hakiki dan kodrati HAM yang melekat pada diri setiap orang pada hakikatnya tidak dapat dicabut, dihapuskan, atau dirampas oleh siapa pun termasuk penguasa negara. Karena mencabut, menghapus, atau merampas HAM sama artinya menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Prinsip-prinsip dan aturan HAM yang tertuang di dalam instrumen internasional telah dituangkan ke dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Di antaranya, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kebijakan Nasional Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Apabila disimak konsiderans KUHP, sangat jelas bahwa pembentukan KUHP memiliki lima tujuan, yaitu perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa), perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum, dan mewujudkan hukum acara pidana

¹⁰Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, h. 12.

yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Dalam KUHAP terdapat 10 asas yang relevan dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM, antara lain : perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun, praduga tak bersalah, hak untuk memperoleh kompensasi (ganti kerugian dan rehabilitasi), hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan, peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, peradilan yang terbuka untuk umum, pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah, hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkutan dan pendakwaan terhadapnya, dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.¹²

Aturan tentang penahanan berhubungan langsung dengan jaminan perlindungan HAM bagi orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan dikenakan penahanan. Kewenangan untuk melakukan penahanan hanya diberikan kepada penyidik, penuntut hukum, dan hakim pada semua tingkatan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang berisi bahwa penahanan hanya dilakukan oleh aparat penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Selain dari institusi tersebut tidak boleh melakukan penahanan.

Dalam Pasal 21 KUHAP menentukan bahwa penahanan atau penahanan lanjutan hanya dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindakan pidana yang pelakunya diancam pidana lima tahun atau lebih

¹¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme* (Bandung: Binacipta, 1996), h. 77.

¹²Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, h. 15.

atau tidak sampai lima tahun tetapi disebut secara khusus sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat ditahan, yang dikhawatirkan pelakunya dapat melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Dalam Pasal 31 KUHAP mengatur tentang penangguhan penahanan. Ketentuan ini memberi kesempatan kepada tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mengajukan penangguhan penahanan kepada pejabat yang berwenang, baik dengan jaminan atau tanpa jaminan uang atau orang. Namun penangguhan penahanan dapat dicabut apabila syarat yang dibebankan kepada tersangka atau terdakwa dilanggar.

Selain ketentuan penahanan, KUHAP mengatur pula hak-hak tersangka atau terdakwa, diantaranya yaitu hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat (Pasal 50), hak untuk memperoleh bantuan hukum dan menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57), hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58), hak untuk diberitahukan tentang penahanan terhadap dirinya (Pasal 59), hak untuk menerima kunjungan sanak keluarganya (Pasal 60), hak untuk menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63), hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan terhadap dirinya disertai ganti rugi, dan rehabilitasi (Pasal 77 dan Pasal 95).¹³

Setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali yang berurusan dengan hukum, baik penegak hukum ataupun yang melanggar hukum harus melaksanakan dan menerapkan asas-asas yang berkaitan dengan hak tersangka dalam penyidikan maupun penahanan. Orang yang bertindak sebagai penegak hukum wajib menghormati hak orang yang melakukan tindak pidana dan tidak menghambat tersangka atau terdakwa dalam memperoleh hak-haknya tersebut.

Kewenangan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dipertegas dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

¹³Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, h. 17-18.

Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidik melakukan penyelidikan dan penyidik melakukan penyidikan.

Karena pidana dijatuhkan setelah melalui proses hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu *qadhi*. Sebagai penerapan atas asas praduga tak bersalah, maka harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Dalam Islam terdakwa tidak akan dijatuhi hukuman jika tidak benar-benar terbukti melakukan tindak pidana. Sebagai dasar dalam firman Allah SWT. dalam QS. al-Hujurat/49:12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرَهُتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.¹⁴

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka khususnya dalam penyidikan tindak pidana, khususnya pada tahap interrogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Seperti yang terjadi di Polsek Ujung Pandang, saat proses penyidikan, tersangka kerap mendapat tekanan seperti paksaan dan tindakan kekerasan, mendapat pukulan sehingga timbul rasa takut tersangka untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517.

untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara yang dilakukan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan kerana merupakan tindakan yang melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Terkadang saat proses penangkapan terhadap seseorang, penyidik atas perintah penyidik, penyidik pembantu maupun penyidik, menangkap seseorang dengan tidak disertai surat tugas dan surat perintah penangkapan. Pada saat pemeriksaan oleh penyidik, tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukumnya, namun kadang tersangka tidak didampingi dengan penasihat hukum sehingga tersangka tidak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.

Terdapat hal yang menarik menurut peneliti dapat dikaji lebih mendalam terkait dengan perlindungan hukum hak-hak tersangka yang telah diatur dalam KUHAP dalam kenyataannya dilanggar atau tidak diberikan oleh penyidik. Selain itu menarik juga dibahas mengenai penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya menurut hukum yang berlaku. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam di Polsek Ujung Pandang”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah pada perlindungan hukum hak tersangka oleh aparat kepolisian pada proses penyidikan tindak pidana dalam hukum pidana Islam.

2. Deskripsi Fokus

- a. Perlindungan Hukum
- b. Hak-hak
- c. Tersangka
- d. Penyidikan
- e. Tindak pidana

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Perlindungan Hukum	Memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
Hak-hak	Segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan belum lahir.
Tersangka	Seseorang yang karena keadaan atau perbuatan yang dilakukannya patut diduga atau melakukan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup.
Penyidikan	Menurut Pasal 1 (2) KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

	bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Tindak Pidana	Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mengarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang teliti. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana di kepolisian. Berdasarkan pokok masalah tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka dalam penyidikan tindak pidana di Polsek Ujung Pandang ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran aparat kepolisian di Polsek Ujung Pandang terhadap hak tersangka dalam penyidikan ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana dalam hukum pidana Islam ?

D. Kajian Pustaka

Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi

kemungkinan signifikan dan kontribusi akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu.¹⁵

Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya :

1. Soeharto, dalam bukunya *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2007. Membahas mengenai HAM dan Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban dalam UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lain, hak tersangka dan terdakwa dalam undang-undang tindak pidana terorisme. Secara umum sering dikatakan, bahwa fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan Negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dan terdakwa dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Penulis lebih fokus membahas hak tersangka dalam penyidikan dan hak tersangka dalam hukum pidana Islam, akan tetapi buku ini sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian, karena buku ini membahas mengenai Perlindungan hak tersangka dalam system peradilan pidana Indonesia.
2. Suharto dan Jonaedi Efendi, dalam bukunya *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, 2016. Membahas mengenai Proses dalam tindak pidana, asas-asas hukum pidana, penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, upaya hukum serta hak-hak tersangka/terdakwa. Seorang tersangka atau terdakwa

¹⁵Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah : Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 13.

harus mengetahui hak-haknya. Pengetahuan tentang objek hukum memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepad kita tentang makna hukum yang sebenarnya. Karena hukum pidana mengancam kebebasan seseorang, maka sangat penting bagi tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Yang membedakan buku ini dengan penelitian penulis yakni penulis lebih mengarah kepada perlindungan hak tersangka dalam hukum pidana Islam. Namun buku ini terdapat 1 bab yang secara khusus membahas mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dalam hukum acara pidana yang sangat membantu penulis dalam penelitiannya untuk membedakan apa yang telah diatur dalam undang-undang dengan apa realita yang terjadi pada saat proses penyidikan oleh kepolisian.

3. Erni Whidayanti, dalam bukunya *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Didalam KUHAP*, 2016. Beliau menggambarkan kedudukan tersangka yang dalam proses pradilan merupakan sosok yang lemah, mengigat bahwa lawan dalam beracara pigur yang tegak yakni Negara melalui aparaturnya. Kedudukan yang tidak seimbang inilah melahirkan suatu gagasan bahwa tersangka dan terdakwa harus mendapat bantuan hukum serta moril-semangat yang cukup, agar setara dalam memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya. Dari pengamatan penulis, jarang sekali tersangka mendapat bantuan hukum sehingga keadilan hukum yang ada di Indonesia masih berpihak kepada yang bertahta dan berkuasa.
4. Munir Faudy dan Sylvia Laura, dalam bukunya *Hak Asasi Tersangka Pidana*, 2015. Membahas tentang ketidakberdayaan tersangka, terdakwa, atau terpidana

meskipun kepadanya undang-undang telah dianugerahkan hak-hak dan kewenangan, yang sudah diakui secara universal, yang dalam hal ini ditinjau dari perspektif hukum Indonesia, seperti hak tersangka untuk diam, hak untuk didampingi oleh pembela, hak-hak Miranda, hak untuk tidak diterapkan undang-undang yang berlaku surut, hak untuk tidak terjadi *double jeopardy*, antipemidanaan diri, hak untuk tidak disiksa dan tidak dijatuhkan hukuman yang kejam, prinsip *presumption of innocence*, dan masih banyak hak tersangka yang terpasung oleh teori dan praktik hukum di Indonesia. Penulis juga membahas mengenai jaminan hak tersangka dalam hukum pidana Islam yakni jaminan untuk kepentingan tertuduh, jaminan pada saat penahanan, jaminan pada saat interogasi dan jaminan pada tahap pemeriksaan di Pengadilan.

5. Ruslan Renggong, dalam bukunya *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, 2014. Membahas mengenai hukum acara pidana dari aspek perlindungan hak asasi manusia dalam proses penahanan di Indonesia, termasuk memahami peran aparat penegak hukum sebagai komponen sistem peradilan pidana. Penulis lebih fokus membahas tentang aspek perlindungan HAM di Indonesia khususnya dalam konteks Hukum Acara Pidana, karena menyajikan konsep asas, teori, dan landasan hukum yang substantif dan relevan sehingga bermanfaat untuk diketahui oleh masyarakat umum perihal HAM di Indonesia.
6. Rozali Abdullah, dalam bukunya *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, 2002. Membahas mengenai Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakan dan menyebarluaskan pemahaman hak asasi manusia seluruh warga masyarakat. Tugas ini hanya bisa dijalankan oleh aparatur

pemerintah yang memiliki pengetahuan, pemahaman serta kepedulian terhadap Hak Asasi Manusia. Penulis lebih fokus membahas mengenai eksistensi Hak Asasi Manusia di Indonesia yang banyak dilanggar oleh aparat penegak hukum baik lembaga tinggi negara maupun aparatur pemerintah yang tidak menghormati hak asasi seorang tersangka.

7. Kurniati, dalam bukunya *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam : Suatu Analisis Komparatif antara HAM dalam Islam dengan HAM Konsep Barat*, 2011. Menjelaskan dalam Islam, hak-hak manusia merupakan anugrah Tuhan. Hak asasi manusia dalam Islam bersifat teosentris, yakni bertujuan untuk dan bersumber dari Tuhan. Perbedaan formal antara hak asasi dengan hak lainnya dalam Syariah dapat dibuat dengan mengacu pada al-Qur'an. Suatu hak yang didasarkan pada perintah al-Qur'an yang jelas dapat diklasifikasikan sebagai hak-hak hukum dasar. Sedangkan penulis lebih fokus membahas mengenai hak asasi tersangka dalam penyidikan perkara, sedangkan buku ini secara umum membahas garis-garis besar mengenai hak asasi manusia baik universal maupun dalam hukum Islam.
8. Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya *Penelitian Hukum*, 2005. Memberikan pemahaman tentang prosedur penelitian yang berkaitan dengan hukum dan langkah-langkah penelitian hukum maupun metode yang dipakai dalam meneliti sebuah objek penelitian. Penulis menggunakan buku ini dalam penelitian menggunakan metode yuridis empiris dan yuridis normatif, sedangkan penulis juga menggunakan pendekatan penelitian yuridis syar'i yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana di Polsek Ujung Pandang.
 - b. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran aparat kepolisian di Polsek Ujung Pandang terhadap hak tersangka dalam penyidikan.
 - c. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana dalam hukum pidana Islam.
2. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :
 - a. Sebagai bahan perbandingan serta bahan penelitian selanjutnya menyangkut *das sein* dan *das sollen* tentang pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penyidikan.
 - b. Sebagai bahan rujukan untuk lebih mengutamakan hak asasi manusia khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik kepolisian agar ke depan lebih arif dan bijaksana dalam melihat rumusan hukum di tengah masyarakat.
 - c. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi wacana pemikiran insan akademis dalam menggali hukum kemudian menerapkan dalam wujud nyata sehari-hari.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Hak dan Kedudukan HAM di Indonesia

1. Pengertian Hak dan Hak Asasi Manusia

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan belum lahir. Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau menurut sesuatu, dan derajat atau martabat.¹ Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikhendaki atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan atau jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan pengertian hak asasi manusia yakni “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

¹Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 174

²Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indoensia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 10.

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 (1) UU. Nomor 39 Tahun 1999).

Hak asasi manusia secara definitive berarti kumpulan hak yang melakat pada manusia yang dilahirkan sebagai manusia dan tidak ada ketentuan apapun yang bisa mengurangi dan mencabut hak tersebut. Hak asasi ini tidak menuntut positivisme, artinya hak asasi tidak menuntut keharusan untuk dimuat dalam undang-undang atau konstitusi. Jadi hak asasi manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah hak-hak kemanusiaan yang sangat mendasar yang dimiliki oleh manusia.³

Jadi HAM adalah hak kodrati yang berasal dari Tuhan, sehingga tidak seorang atau kekuasaan di dunia ini boleh merampas hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir. HAM bukan pemberian manusia lain, pemerintah, ataupun undang-undang dasar. Hanya dengan penghargaan dan tegaknya hak kodrati itu pula, manusia dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

2. Kedudukan HAM dalam Sistem Hukum Nasional

Konsep HAM yang berlaku universal membebaskan kepada Indoneisa untuk meratifikasi kedalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan falsafah pancasila dan undang-undang dasar 1945. Salah satu contoh adalah kovenan hak-hak sipil (*Internasional Covenan on Civil and Political Right*).

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia

³Masdar F. Mas’udi, *Agama dan Hak Rakyat cet I* (Jakarta: Guna Aksara, 1993), h. 45.

semakin pesat. Hal ini ditunjukkan lagi dengan semakin banyaknya instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia yang diratifikasi dan diadopsi oleh peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.⁴

Lembaga-lembaga hukum yang berhubungan dengan HAM saat ini sangat banyak sekali, meliputi Komnas HAM, Peradilan HAM, Kepolisian, dll. Dan ada juga lembaga yang dibentuk melalui Undang-undang maupun swasta. Tujuan dari setiap lembaga yang ada yaitu untuk terciptanya dan terjaganya HAM di negara Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran HAM seperti jaman dulu. Walaupun sudah ada undang-undang yang dibentuk untuk menjamin HAM setelah reformasi, masih banyak tindak pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh pejabat ataupun warga negara sendiri. Sehingga nilai dari substansi Undang-undang HAM yang sudah dibentuk tersebut perlu di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat memahami bahwa HAM sekarang lebih dilindungi daripada ere orde sebelumnya.

B. Tersangka dan Hak Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Dalam Pasal 1 (13) KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut J.C.T Simorangkir, tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.

⁴Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indoensia*, h. 16.

Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

2. Golongan Tersangka

Tersangka dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

- a. Tersangka yang karena kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan.

Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnyanya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.

- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti.

Pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Hak Tersangka

Seorang tersangka atau terdakwa harus mengetahui hak-haknya. Karena hukum pidana mengancam kebebasan seseorang. Oleh karena itu sangat penting tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan diri.

Seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana kemudian ditangkap, memiliki banyak jenis hak-hak fundamental dari tersangka yang terancam berkaitan dengan suatu proses hukum. Antara lain yang sudah diakui oleh dunia internasional sebagai berikut:

- a. Hak untuk tidak dilakukan pembedaan diri (*self incrimination*).
- b. Hak untuk didengar dan membela diri (*hearing and self defence*).

- c. Hak untuk tidak dijatuhkan hukuman yang kejam atau aneh (*cruel and unusual punishment*).
- d. Hak untuk dibela oleh advokat secara efektif (*right to effective assistance of counsel*).
- e. Hak untuk tidak dihukum atau diproses hukum dua kali terhadap perbuatan pidana yang sama (*double jeopardy*).
- f. Hak untuk tidak diterapkan aturan yang berlaku surut (*expost facto law*).
- g. Hak untuk diberlakukan praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).
- h. Hak tersangka untuk diam (*remain silence*).
- i. Hak untuk dikonfrontasi (*right to confrontation*).
- j. Hak untuk tidak diinterogasi atau dibuktikan secara aneh.
- k. Hak atas proses pengadilan yang cepat dan murah.
- l. Hak untuk tidak diberlakukan tuduhan pidana yang direkayasa, direka-reka atau diada-adakan.
- m. Hak untuk tidak dipidana terhadap kasus-kasus yang sebenarnya hanya kasus perdata.
- n. Hak untuk dipersamakan kedudukannya dalam hukum (*equality of the law*).
- o. Hak untuk disidang dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- p. Hak untuk tidak dipublikasi proses pemeriksaan tersangka secara berlebihan yang setara dengan “pengadilan oleh pers” (*trial by the press*).
- q. Hak untuk mengajukan saksi (*a de charge*).
- r. Hak untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
- s. Hak untuk dipulihkan nama baiknya jika terbukti bahwa tersangka ternyata tidak bersalah.
- t. Hak untuk tidak ditangkap, digledah, ditahan, disadap secara sewenang-wenang.

- u. Hak atas suatu proses peradilan yang adil (*due process of law*), terbuka, bebas dan tidak memihak.
- v. Hak untuk dihormati kepemilikan hartanya, sehingga tidak dapat hartanya disita secara sewenang-wenang.
- w. Hak atas ganti rugi dan pemulihan (*remedial*) atas salah tangkap/salah tahan/salah penghukuman, dan lain-lain.
- x. Hak untuk tidak diusik-usik atau dicampuri urusan pribadinya atau keluarganya oleh negara, atau oleh orang lain.
- y. Hak untuk tidak dibuang/dihusir dari masyarakat lingkungannya.

Adapun hak tersangka dalam penyidikan perkara disebutkan dalam KUHAP yakni sebagai berikut:

- a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan
- Ketentuan dalam Pasal 50 KUHAP dijelaskan :
- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
 - 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
 - 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Rumusan Pasal 50 KUHAP sangat jelas menyebutkan kata “segera mendapatkan pemeriksaan” dari pejabat yang berwenang pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 50 KUHAP maka pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan tidak dibenarkan menunda pemeriksaan tanpa dasar hukum yang kuat. Semua perkara yang ditangani secepatnya berkepastian hukum sehingga status para tersangka atau terdakwa terutama yang dikenakan penahanan menjadi jelas.⁵

⁵Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014), h. 212.

b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti

Seorang tersangka berhak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka atau terdakwa tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 51 KUHAP.

Penjelasan dalam Pasal 51 KUHAP diterangkan, dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka tersangka akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian tersangka akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan.⁶

c. Hak memberikan keterangan secara bebas

Diatur dalam Pasal 52 KUHAP yaitu *“dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”*⁷

Penjelasan Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau tersakwa.

d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa

Diatur dalam Pasal 177 dan 178 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 177 KUHAP

⁶Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan* (Jakarta: Prenadamedia, 2006), h. 84-85.

⁷Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 223.

- 1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 KUHAP
- 2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu/atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 KUHAP.

Pasal 178 KUHAP

- 1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
- 2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 53 KUHAP yang menyatakan bahwa tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa.⁸

e. Hak mendapat bantuan penasihat hukum

Dalam sistem peradilan Indonesia, hak atas bantuan hukum diatur oleh Pasal 54 KUHAP:

“Guna kepentingan pembelaan diri, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁹

⁸Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, h. 86.

⁹Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, h. 223.

Hak dari tersangka pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara kepada tersangka dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pembela yang terakreditasi, berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana, sehingga tersangka pidana tersebut tidak dirugikan haknya dalam proses hukum tersebut dan dapat menjalankan proses hukumnya secara yang tidak merugikan dirinya sehingga tercapai suatu ketentuan hukum berkeadilan baik bagi dirinya sendiri, bagi korban kejahatan, maupun bagi seluruh masyarakat. Dalam hal-hal tertentu, bahkan pemerintah maupun profesi advokat harus menyediakan dan/atau menawarkan bantuan hukum cuma-cuma terhadap tersangka pidana tertentu.¹⁰

f. Hak menghubungi penasihat hukum

Setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menghubungi penasihat hukum, apalagi yang bersangkutan diancam pidana mati, diancam pidana penjara lima belas tahun atau lebih, diancam pidana lima tahun atau lebih yang tersangka atau terdakwa tidak mampu. Hal ini diatur dalam Pasal 57 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

g. Hak menerima kunjungan dokter pribadi

Dalam hal pelayanan kesehatan, para tahanan memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tidak ditahan. Hak para tahanan untuk memperoleh kesehatan ditegaskan dalam Pasal 58 KUHAP bahwa:

¹⁰Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h. 27.

“tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.¹¹

h. Hak menerima kunjungan keluarga

Kunjungan pihak keluarga tahanan, selain dapat meringankan beban tahanan juga dapat menjadi sarana untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan dan perlakuan pejabat yang melakukan penahanan terhadap tahanan. Kehadiran keluarga menyaksikan langsung kondisi fisik dan mental tahanan, akan mencegah terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan. Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan umumnya terungkap setelah adanya kunjungan pihak keluarga.¹²

Ketentuan hak menerima kunjungan keluarga diatur dalam Pasal 60 dan 61 sebagai berikut:

- 1) Pasal 60, mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
- 2) Pasal 61, tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

i. Hak menerima dan mengirim surat

Meskipun terdakwa atau tersangka dikekang kebebasannya dalam berinteraksi dengan dunia luar, tetapi tersangka atau terdakwa masih memiliki hak

¹¹Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, h. 223.

¹²Ruslan Ranngong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, h. 141.

untuk berkomunikasi dengan bebas melalui surat. Tersangka atau terdakwa berhak untuk menerima dan mengirim surat sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis.
 - 2) Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat-menyurat itu disalahgunakan.
 - 3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.
- j. Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara terbuka untuk umum

Seorang tersangka atau terdakwa berpotensi mengalami gangguan secara psikis. Sebab ia dihadapkan pada persoalan yang membelenggu kebebasannya. Oleh karena itu, ia membutuhkan terapi yang dapat menenangkan diri dan pikirannya. Pada umumnya, manusia memiliki sisi ruhani yang dapat menjadi penenang. Untuk mencapai kestabilan rohani, seorang dapat dibantu oleh rohaniawan, dengan demikian Pasal 63 KUHAP memberikan kepada tersangka atau terdakwa hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.¹³

¹³Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana : Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, h. 89.

Selain mendapatkan hak dikunjungi rohaniawan, tersangka atau terdakwa juga berhak diadili secara terbuka di pengadilan. Ini ditunjukkan agar semua pihak dapat mengetahui apakah yang disangkakan atau didakwakan kepada orang tersebut terbukti atau tidak. Apalagi pada era transparansi ini, pengadilan terbuka untuk umum merupakan salah satu asas yang fundamental dalam sistem peradilan.

k. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Pada umumnya, pihak penyidik atau penuntut umum tidak memberikan informasi yang jelas bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan.¹⁴

l. Hak menuntut ganti kerugian

Hak atas ganti kerugian dijabarkan dalam Pasal 1 angka 22 KUHP bahwa:

ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁵

Mekanisme pengajuan tuntutan ganti kerugian sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHP. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan melalui dua cara yakni untuk perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus melalui sidang pra-peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHP, sedangkan cara kedua melalui pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke pengadilan sedapat mungkin diperiksa

¹⁴Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana : Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, h. 89-90.

¹⁵Redaksi Sinar Grafika, *KUHP dan KUHP*, h. 202.

oleh hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan acara pemeriksaan mengikuti acara pra-pradilan.¹⁶

m. Hak memperoleh rehabilitasi

Rehabilitasi dalam proses perkara pidana cenderung memberikan makna pemulihan nama baik. Hak memperoleh rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHAP yakni :

- 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputuskan oleh hakim pra-peradilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Sebagaimana pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semua. Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.¹⁷

¹⁶Ruslan Ranngong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, h. 144.

¹⁷Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana : Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, h. 90.

Kemudian menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU.

C. Penyidikan dan Tahap Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyidik. Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan antara penyidik dan penyidik. Penyidik melakukan penyelidikan dan penyidik melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan cara yang diatur dalam KUHAP. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁸

¹⁸Ruslan Ranngong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, h. 207.

Penyelidikan merupakan langkah awal dari fungsi penyidikan sehingga penyelidikan bukan tindakan berdiri sendiri. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 (2) KUHAP). Penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan, mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan hak asasi manusia. Tahap penyidikan dapat dilakukan setelah perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana dalam proses penyelidikan.¹⁹

Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Ketika dalam proses penyidikan telah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim berita acara pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.

2. Kewenangan Penyelidik dan Penyidik

Menurut Pasal 4 KUHAP, penyelidik ialah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mempertegas bahwa yang memiliki kewenangan penyelidikan hanya pejabat polisi. Adapun kewenangan penyelidik antara lain:

- a. Kerena kewajibannya:

¹⁹Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana : Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, h. 47.

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik bisa melakukan tindakan berupa:
- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan, penyidik setelah melaksanakan tugasnya melaporkan hasilnya kepada penyidik. Laporan penyidik tersebut harus dalam bentuk tertulis sehingga menjadi alat kontrol dan pembinaan terhadap penyidik.

Pasal 6 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Adapun kewenangan penyidik menurut Pasal 7 KUHAP, antara lain:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain penyidik yang diatur di dalam KUHAP, juga dikenal pula penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Jaksa misalnya, berwenang melakukan penyidikan terhadap pembuat tindak pidana korupsi. Penyidik lainnya yaitu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pembuat tindak pidana korupsi. Juga perwira TNI Angkatan laut dapat menjadi penyidik tindak pidana perikanan menurut Pasal 73 UU Perikanan.²⁰

3. Tahapan Penyidikan

Prosedur penyidikan tindak pidana dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prosedur yang ditempuh oleh penyidik dalam rangka melakukan penyidikan pada dasarnya diawali dengan pengumpulan bukti-bukti melalui pemeriksaan para saksi, tersangka, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Penangkapan terhadap seorang tersangka dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini untuk menghindari terjadinya salah pengkapan yang

²⁰Ruslan Ranngong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, h. 212.

merugikan hak dan mencemar nama baik, dalam Pasal 17 KUHAP ditegaskan bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Dalam melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka, petugas kepolisian wajib menunjukkan surat perintah penangkapan, dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa “pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

Dalam penangkapan pelaku tindak pidana pencurian ditempat kejadian perkara, maka tidak diperlukan surat perintah penangkapan. Aparat kepolisian baru membuat surat perintah penangkapan setelah tersangka pelaku tindak pidana pencurian dibawa ke kantor kepolisian. Selanjutnya prosedur pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana dilakukan sesuai dengan KUHAP dengan memperhatikan hak-hak tersangka.

D. Hak Tersangka Dalam Hukum Pidana Islam

Hak asasi manusia dalam perspektif hukum pidana Islam dimaksudkan untuk menampik kritikan orientalis terhadap ajaran agama Islam dengan tujuan mendiskreditkan Islam. Apalagi yang berkaitan dengan hukum pidana (hudud).

Jika berbicara tentang hak-hak asasi manusia dalam Islam, maka yang dimaksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Allah. Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali

semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Allah.²¹

Piagam dan proklamasi serta resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dapat dibandingkan dengan hak-hak yang disertai sanksi oleh Tuhan. Semua muslim dan semua penguasa yang mengakui dirinya sebagai muslim harus menerima, mengakui dan melaksanakannya. Jika mereka gagal melaksanakannya atau melanggarnya dengan dalil apapun akan mendapatkan sanksi. Sebagai dasar tersebut, dapat dipahami firman Allah swt. Dalam QS. al-Maidah/5:44.

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Terjemahnya :

... Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.²²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa jika penguasa-penguasa duniawi menganggap kata-katanya dan keputusannya sebagai kebenaran dan apa-apa yang dikatakan Tuhan sebagai kebohongan, mereka adalah kafir. Di lain pihak, apabila mereka menganggap perintah-perintah Tuhan sebagai hal yang benar tetapi dengan sengaja mereka mengesampingkannya demi membenarkan keputusan-keputusannya, maka mereka adalah orang-orang keji, dan sebagainya.

Dalam suatu kelompok, hak-hak seseorang diterapkan dan dijamin oleh kewajiban anggota-anggota yang lain baik secara individual atau secara kolektif. Bagi konsepsi Barat tradisional, definisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dapat dibentuk dengan kriteria imperatif atau subyektif, tradisional atau nasional, dan dengan demikian akan berbeda-beda di luar manusia. Kewajiban untuk

²¹Bambang Iriana Djaja Atmadja, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 10.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 167.

menghormati hak-hak perseorangan dalam batas hal-hal yang dianggap sebagai kebaikan umum, mendapatkan kekuatan pelaksanaannya dari sebab sosiologis, khususnya hal-hal yang dapat bercampur dengan moral, karena membawa ciri tradisi kebudayaan, aspirasi psikologis dan kepastian ideologis. Jaminan hak-hak perseorangan juga bercampur dengan kekerasan, dan yang dilancarkan oleh masyarakat menyebar kepada ketidakseimbangan antara hak-hak progratif manusia dan kewajiban kolektif.²³

Gagasan Hak Asasi Manusia dalam Islam, tidak terlepas dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yang dikenal dengan istilah *maqashidu al-syariah*, yang berarti tujuan-tujuan hukum atau tujuan-tujuan syari, termasuk di dalamnya untuk tujuan kemanusiaan atau kebutuhan manusia.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hak-hak asasi manusia dalam Islam suatu hak yang mutlak yang diberikan setiap orang dan kita wajib menghormati hak-hak tersebut dan akan mendapat sanksi bagi mereka yang melanggar atau tidak mengindahkannya. Adapun hak yang dimaksud antara lain:

1. Hak Untuk Hidup

Semua manusia di dunia mempunyai hak untuk hidup, hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia paling utama dalam Islam. Karena hidup merupakan karunia Tuhan, oleh itu tidak seorangpun yang berhak merampasnya kecuali berdasarkan kebenaran dan ketentuan dari Allah. Hal ini dapat dipahami dalam firman Allah swt dalam QS. al-Hijr/15:23.

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya :

Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi.²⁴

²³Bambang Iriana Djaja Atmadja, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam.*, h. 12.

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 393.

Ayat ini menegaskan kekuasaan Allah swt. menghidupkan dan mematikan, setelah sebelumnya mengisyaratkan kekuasaan-Nya itu, dalam membinasakan dan membangkitkan masyarakat serta menganugerahkan air dan menjadikannya segar untuk diminum. Di sini Allah swt. menegaskan bahwa: Dan sesungguhnya Kami benar-benar hanya Kamilah yang menghidupkan makhluk material dan spiritual dan mematikan mereka dan Kami pulalah para Pewaris dari segala apa yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk yang pernah hidup.²⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang menentukan mati dan hidupnya seseorang hanyalah Allah, sehingga manusia tidak berhak menghilangkan hidup seorang dengan membunuhnya. Kerana itu Allah swt. melarang membunuh sesama manusia. Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, setiap manusia wajib menghormati kehidupan sesama manusia karena kehidupan itu sendiri merupakan karunia Allah dan tak seorangpun yang berhak merampasnya kecuali berdasarkan kebenaran dan ketentuan dari Allah sendiri.²⁶

2. Hak Kemerdekaan

Islam sejak kedatangannya selalu menyatakan bahwa semua manusia sama di sisi Allah. Tidak ada bedanya antara hamba dengan tuannya. Bahkan dalam beberapa sanksi pelanggaran, seorang dapat dinyatakan bebas dari hukuman setelah memerdekakan seorang budak. Hal tersebut berarti Islam berusaha menghapuskan perbudakan dan menganjurkan kemerdekaan individu.

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Vol. 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 115

²⁶Kurniati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam : Suatu Analisis Komparatif Antara HAM Dalam Islam Dengan HAM Konsep Barat*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 69-70

Kerana tingginya nilai kemerdekaan dan kebebasan yang diberika kepada seseorang, bahkan sampai kepada persoalan pemilihan agama juga tercakup. Sebagai dasar dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Terjemahnya :

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁷

Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memiliki satu akidah, katakan saja akidah Islam, dia terikat dengan tuntutan-tuntutannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapanannya. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai sehingga tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.²⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu hak asasi manusia dalam Islam adalah hak kemerdekaan. Yaitu merdeka atau bebas untuk melakukan suatu tindakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti bebas untuk memeluk agama, bebas untuk mengeluarkan pendapat dan sebagainya.

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.63.

²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Vol. 1*, h. 668

3. Hak Atas Penghargaan

Manusia adalah makhluk yang tertinggi dan termulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Mulia karena wujud kemanusiaannya, tanpa melihat asal usul, bahasa, daerah, atau tempat tinggalnya. Kemuliaan itu tidak akan berkurang karena durhakanya, dan sebagainya. Dia tetap mulia dan mempunyai harga diri. Sebagai dasar dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Isra/17:70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Terjemahnya :

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.²⁹

Ayat ini menjelaskan sebab anugerah yakni karena manusia adalah makhluk unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia, baik ia taat beragama maupun tidak. Semua manusia dari segi kemanusiaannya memiliki kehormatan yang sama, antara lain semua diberi hak memilah dan memilih serta diberi pula kemampuan melaksanakan pilihannya lagi diciptakan sebagai makhluk bertanggung jawab. Kelebihan-kelebihan yang diperolehnya itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti.³⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memuliakan dan melebihkan manusia tanpa kekurangan sedikitpun. Sebagai makhluk yang mulia, setiap manusia menghendaki adanya persamaan dalam segala penilaian, penghargaan, kedudukan,

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.789.

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Vol. 7*, h. 515-516

penghidupan dan martabat yang tinggi. Oleh karena itu seseorang tidak dibenarkan menghina orang lain, mengejek, dan melecehkannya.³¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia adalah hak penghargaan yakni manusia adalah makhluk yang mulia diantara makhluk lainnya sehingga patut untuk mendapatkan penghargaan termasuk penghargaan terhadap kaum wanita dalam bentuk apapun yaitu wajib dilindungi dan dijaga kemuliannya dan kesuciannya.

4. Hak Memiliki

Islam juga mengakui hak pemilikan bagi seseorang dalam berbagai tempat, Alquran menganjurkan manusia untuk mencari rezki yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. an-Nahl/16:14.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Terjemahnya :

dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.³²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah telah menyediakan beberapa sarana untuk mencari rezki, baik melalui lautan, daratan, perdagangan, yang semuanya merupakan jalan untuk memperoleh harta. Adanya perintah untuk mencari rezki, maka dengan sendirinya pemilikan atas harta tersebut diakui.³³

³¹H. Umar Shihab, *Alquran dan Rekayasa Sosial, Cet. I* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990) h.121.

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.404.

³³H. Umar Shihab, *Alquran dan Rekayasa Sosial, Cet. I*, h.127.

Hak pemilikan dalam Islam berbeda dengan penerapan kapitalis. Pemilikan dalam kapitalis merupakan kebebasan mutlak tanpa terbatas terhadap seseorang, dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain.

Dalam Islam pemilikan mempunyai batas tertentu. Seseorang tidak dibenarkan memperoleh harta semaunya saja. Namun harus melalui prosedur tertentu yang sesuai dengan ajaran Islam. Hak pemilikan dalam Islam harus berfungsi sosial, yakni mempunyai sifat tenggang rasa terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan.³⁴

³⁴H. Umar Shihab, *Alquran dan Rekayasa Sosial, Cet. I*, h.127.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹

2. Lokasi Penelitian

Pengambilan data diambil langsung dari Kantor Polisi Sektor Ujung Pandang yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi awal terlihat bahwa masih ada hak-hak tersangka yang belum terpenuhi dalam penyidikan. Selain itu adanya keterbukaan dari pihak kepolisian terutama penyidik terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini. Kemudian ditunjang dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu dengan cara melakukan penelitian praktik di lapangan yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu dengan riset dan wawancara pada Kantor Polisi

¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.

Sektor Ujung Pandang, guna mendapatkan pendapat-pendapat untuk menunjang penelitian ini. Kemudian ditambah dengan pendekatan normatif syar'i (teologi normatif) yaitu dengan melihat apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist serta pendapat para ulama.

C. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus atau masalah yang menjadi objek penelitian dan hasil yang diperoleh dari wawancara.
2. Data sekunder, yaitu sejumlah data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian lapangan (*field research*) kualitatif dibutuhkan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena hukum dan persoalan kehidupan manusia.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan (*Observation*), yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan untuk menghimpun data sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran penelitian.
2. Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data secara bertatap muka (*face-to-face*) antara pencari informasi dengan sumber informasi (*informan*) guna mendapatkan informasi-informasi atau keterangan secara mendalam dan terperinci. Yang menjadi informan peneliti adalah penyidik

polsek ujung pandang, tersangka tindak pidana, serta advokat/lembaga bantuan hukum.

3. Studi Dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan menelaah data dari dokumen (laporan, jurnal ilmiah, buku, pendapat, teori) dari peneliti lain yang ada hubungannya dengan hak tersangka tindak pidana.

E. Instrumen Penelitian

Alat pengumpul data (instrumen) menentukan kualitas data dan kualitas data merupakan kualitas penelitian, alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi.² Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai instrumen utama
2. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan
3. Buku catatan dan alat tulis
4. Kamera

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data di artikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

- a. *Identifikasi* data adalah dengan menumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas..

²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 65-66.

- b. *Koding* data adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.³
- c. *Editing* data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data dideskripsi dalam menemukan jawaban pokok masalah. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

Teknik analisis data yang akan dilaksanakan adalah, mengorganisir data yang sudah diperoleh melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen, mengembangkan kategori dalam proses reduksi data yaitu proses seleksi data dengan membuang hal yang tidak penting, selanjutnya menyajikan data yang sudah diverifikasi dalam bentuk susunan informasi yang memungkinkan dapat ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian dikaitkan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 126.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilihat dengan menghubungkan antara rumusan masalah dengan jawaban atau hasil wawancara.

Adapun cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang digunakan adalah dengan peningkatan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan kemampuan pancaindra, namun juga menggunakan semua pancaindra termasuk adalah pendengaran, perasaan, dan insting peneliti, dengan meningkatkan ketekunan pengamatan di lapangan maka, derajat keabsahan data telah ditingkatkan pula.⁴

⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.264.

PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

1. Letak Geografis Polsek Ujung Pandang

Terletak pada posisi 5°8'15" BT dan 119°24'27" LS. Luas wilayah cakupan Polsek Ujung Pandang adalah 2,63 km², dengan jumlah penduduk 27.201 jiwa, terdiri dari laki-laki 12.824 jiwa, perempuan 14.377 jiwa.

Secara letak geografis Polsek Ujung Pandang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Wajo
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Makassar
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Mariso
- d. Sebelah Barat: Selat Makassar

Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kelurahan di Wilayah Kecamatan Ujung Pandang

NO	KELURAHAN	LUAS AREA (KM ²)	RUMAH TANGGA	PENDUDUK
1	LAE-LAE	0,22	346	1.784
2	LOSARI	0,27	345	2.123
3	MANGKURA	0,37	312	1.504
4	PISANG SELATAN	0,28	792	4.067
5	LAJANGIRU	0,20	1004	6.156
6	SAWERIGADING	0,41	370	1.667
7	MALOKU	0,20	548	2.534
8	BULOGADING	0,23	574	2.791
9	BARU	0,21	405	1.619
10	PISANG UTARA	0,34	959	4.451
	KECAMATAN	2.63	5655	28.696

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya insan Polri yang profesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam penegakan hukum serta sebagai Pelindung Pengayom Pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan dipercaya.

b. Misi

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap / responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- 2) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (Community Policing) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen).
- 4) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 5) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas.
- 6) Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang ber bhineka tunggal ika.

3. Struktur dan Susunan Organisasi Polsek Ujung Pandang



- a. Susunan organisasi Polsek terdiri dari:
 - 1) Unsur Pimpinan
 - 2) Unsur Pengawas
 - 3) Unsur Pelayanan dan Pembantu Pimpinan
 - 4) Unsur Pelaksana Tugas Pokok
 - 5) Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan
- b. Unsur Pemimpin terdiri dari:
 - 1) Kepala Polsek (Kapolsek)
 - 2) Wakil Kepala Polsek (Wakapolsek)
- c. Unsur Pengawas yaitu Unit Provos
- d. Unsur Pelayanan dan Pembantu pimpinan terdiri dari:
 - 1) Seksi Umum (Sium)
 - 2) Seksi Hukum (Sikum)
 - 3) Seksi Hubungan Masyarakat (Sihumas)
- e. Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari:
 - 1) SPKT
 - 2) Unit Intelijen Keamanan (Unitintekam)
 - 3) Unit Reserse Kriminal (Unitreskrim)
 - 4) Unit Pembinaan Masyarakat (Unitbinmas)
 - 5) Unit Samapta Bhayangkara (Unitsabhara)
 - 6) Unit Lalu Lintas (Unitlantas)
 - 7) Unit Polisi Perairan (Unitpolair)
- f. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan yaitu Kepolisian Subsektor (Polsubsektor)

B. Perlindungan Hukum Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana di Polsek Ujung Pandang

Proses penyidikan tindak pidana pada dasarnya harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, penegakan hukum harus dilakukan secara adil, semua hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas saat penyidikan, segera mendapat pemeriksaan, mendapat bantuan penasihat hukum, menerima kunjungan keluarga, yang dianggap bagian dari hak asasi manusia.

Berkaitan dengan perlindungan hukum tersangka, KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas berkaitan dengan hak-hak tersangka dalam Pasal 50 sampai 68 KUHAP, dan semua pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP :

1. Hak segera mendapat pemeriksaan (Pasal 50)

Pasal 50 KUHAP menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu singkat. Tersangka tidak boleh diperiksa melebihi batas waktu yakni 8 jam waktu maksimal pemeriksaan penyidikan.

Proses penyelesaian perkara harus ditangani secepatnya sehingga semua bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat, dan status para tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan menjadi jelas. Tujuan hak ini agar adanya kepastian hukum sehingga nasib tersangka tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hardono, selaku penyidik mengatakan bahwa:

“Pemeriksaan tersangka dibawah umur lebih cepat dibanding dengan dewasa. Paling kalau dibawah umur itu 15 hari, kalau dewasa 40 hari sampai 60 hari.”¹

Namun pada pelaksanaannya, hampir semua tersangka yang ditahan mendapat batas maksimal dalam waktu penahanan yakni untuk tersangka dewasa ditahan di Polsek selama 20 hari, kemudian mengajukan perpanjangan penahanan ke Kejaksaan Negeri selama 40 hari. Adapun untuk tahanan dibawah umur penahanan selama 7 hari kemudian perpanjangan penahanan dari Kejaksaan 8 hari.

Perpanjangan penahanan dilakukan karena alat bukti belum cukup dan biasanya karena tersangka saat pemeriksaan memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan. Ini berakibat kepada masa tahanan tersangka sehingga perlu dilakukan perpanjangan penahanan.

2. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51)

Pada saat pemeriksaan penyidik menggunakan bahasa Indonesia yang mudah untuk dipahami oleh tersangka, bagi tersangka yang diperiksa oleh penyidik yang asal daerahnya sama kadang menggunakan bahasa daerah sehingga tersangka merasa nyaman dan bisa memberikan keterangan yang lebih jelas dalam pemeriksaan.

Hal ini dilakukan agar sangkaan yang diberikan jelas secara rinci sampai tersangka mengerti atas dakwaan terhadapnya. Sehingga tersangka mengetahui berat ringannya sangkaan dan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh tersangka maupun penyidik menjadikan kedua pihak saling menguntungkan karena pemeriksaan tidak dilakukan dalam waktu yang lama dan tidak menguras banyak tenaga.

¹Hardono, Penyidik Polsek Ujung Pandang. *Wawancara*, Polsek Ujung Pandang 23 Oktober 2018.

3. Hak memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52)

Keterangan tersangka diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara yang dihadapi tersangka. Hal ini yang sangat diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan.

Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak dibawah tekanan dan paksaan dari penyidik dalam bentuk apapun baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan, tersangka harus dijauhkan dari rasa takut sehingga keterangan yang diberikan tidak menyimpang dari yang sebenarnya. Jika tersangka memberikan keterangan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Semua keterangan tersangka dicatat oleh penyidik. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan tersangka. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih mudah dibaca. Setelah memberikan keterangan, tersangka membaca berita acara pemeriksaan dan apabila menyetujui isinya tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan dalam berita acara yang dibuat.

4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53)

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu mendapat juru bahasa adalah orang asing, orang

Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia, orang bisu da tuli yang tidak bisa menulis.

5. Hak mendapat bantuan penasihat hukum (Pasal 54)

Tersangka diberitahukan ancaman pidanya saat penyidikan, apabila ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dan tersangka orang yang kurang mampu, maka penyidik menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Apabila ancaman pidananya dibawah 5 tahun penyidik tidak wajib menyediakan bantuan hukum kepada tersangka. Apabila tersangka tidak menggunakan bantuan hukum saat penyidikan maka penyidik akan membuat pernyataan bahwa menolak didampingi penasihat hukum.

Sejak tersangka dalam tahap penyidikan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau penasihat hukum khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Dengan adanya bantuan hukum atau penasihat hukum dapat memberikan perlindungan terhadap tersangka yang merupakan jaminan dari hak asasi manusia (HAM), agar tersangka ataupun terdakwa tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hardono, selaku penyidik megatakan bahwa:

“Semua tersangka wajib, memang diatur dalam KUHAP tentang itu. Namun biasa ada yang menolak mendapat bantuan penasihat hukum karena biasa pikirannya “tidak ada uangnya”, dalam pemeriksaan sudah ditanya *mau ambil pengacara atau tidak* kebanyakan saya periksa tidak ambil pengacara, misalnya kalau pencuri ambil pengacara, pengacara mau untuk apa? dia bela apanya. Kalau untuk yang wajib mendapat pengacara juga ditanya *mau didampingi pengacara atau penasihat hukum atau tidak?* Kebanyakan tidak, untuk sementara tidak kalau untuk pengadilan nanti terserah tersangka.”²

²Hardono, Penyidik Polsek Ujung Pandang. *Wawancara*, Polsek Ujung Pandang 23 Oktober 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herman, selaku penyidik mengatakan bahwa:

“Tersangka yang diancam 15 tahun penjara, seumur hidup, atau pidana mati wajib didampingi penasihat hukum, kalau tersangka tidak mampu maka wajib ditunjukkan seorang penasihat hukum gratis dari Pusbakum (Pusat Bantuan Hukum) di Pengadilan Negeri tapi perlu waktu dan berkas untuk mendapat bantuan hukum, namun tetap banyak yang menolak bantuan hukum makanya dibuatkan surat pernyataan tidak didampingi penasihat hukum karena tersangkanya yang minta.”³

Dapat disimpulkan bahwa penyidik telah memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum namun tersangka menolak karena alasan biaya, kemudian penyidik tidak menunjuk penasihat hukum gratis karena alasan memakan banyak waktu saat penahanan dan perlu banyak berkas. hal ini yang menjadikan belum optimalnya pemberian bantuan hukum di Polsek Ujung Pandang.

6. Hak menghubungi penasihat hukum (Pasal 57)

Bagi mereka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasihat hukumnya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP. Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka atas persetujuan penyidik, penasihat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan penyidikan. Namun jika penyidik tidak menyetujui, penasihat hukum tidak dapat mengikuti jalannya pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herman, selaku penyidik meyakini bahwa:

“Cuma kita kalau awal biasa langsung diperiksa saja, tapi ditanya dulu kalau ada penasihat hukumnya siapkan memang sebelum pemeriksaan, kalau tidak sempat datang untuk semenara kita lakukan pemeriksaan dulu, nanti kita lakukan pemeriksaan tambahan baru didampingi penasihat hukum karena kita terkendala masalah waktu dan masa penahanan.”⁴

³Herman, Penyidik Polsek Ujung Pandang. *Wawancara*, Polsek Ujung Pandang 24 Oktober 2018.

⁴Herman, Penyidik Polsek Ujung Pandang. *Wawancara*, Polsek Ujung Pandang 24 Oktober 2018.

Kedudukan dan kehadiran penasihat hukum saat pemeriksaan hanya bersifat pasif, artinya hanya sebagai “penonton” dan tidak diperkenankan memberi nasihat. Hadirnya penasihat hukum saat pemeriksaan setidaknya mencegah penyidik bertindak sewenang-wenang, sehingga mendorong tersangka berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahui.

7. Hak menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58)

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dokter pribadinya guna untuk mendapat perawatan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

8. Hak menerima kunjungan keluarga (Pasal 60 dan 61)

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan itu, terkadang saat penangkapan terjadi tersangka berada ditempat yang lain.

Tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hardono, selaku penyidik mengatakan bahwa:

“Kalau kunjungan keluarga ada jadwal besok, keluarga bisa datang tiap hari, kalau tidak sesuai jadwal besok biasa makanan bisa masuk, pakaian bisa tapi keluarga tidak bisa membesuk.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan RS, selaku tersangka mengatakan bahwa:

“Biasanya keluarga datang siang bawa makanan, kalau datang pagi biasa tidak bisa ketemu, kalau ada yang datang paling bawa makanan sama baju

⁵Hardono, Penyidik Polsek Ujung Pandang. *Wawancara*, Polsek Ujung Pandang 23 Oktober 2018.

pergi mi lagi. Tidak bisa lama-lama karena tidak enak juga sama teman-teman biasa malu-malu na rasa kalau ada orang datang”⁶

Dapat disimpulkan bahwa adanya jadwal besuk tertentu membuat tersangka menjadi jauh dari keluarganya. Kemudian tidak adanya tempat khusus bagi keluarga dan tersangka untuk bercerita, efeknya tersangka menjadi canggung untuk bercerita dengan keluarga karena merasa tidak enak dengan tersangka lain.

9. Hak menerima dan mengirim surat (Pasal 62)

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka dibolehkan untuk mengirim surat kepada penasihat hukum, sanak saudaranya, termasuk menerima surat dari mereka tanpa diperiksa oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali surat itu diduga disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan akan dibuka tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut dikembalikan kepada pengirim setelah diberi cap “telah ditilik”.

Kebebasan hak surat menyurat tidak terbatas sehingga tersangka kapan saja bisa mengirim surat. Pejabat harus menyediakan alat-alat tulis yang diperlukan untuk terlaksananya surat-menyurat tersebut.

10. Hak menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)

Dengan ditahannya tersangka, telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

11. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum (Pasal 64)

Tersangka yang statusnya telah mendjadi terdakwa harus diadili pada terbuka untuk umum, kecuali pada perkara yang memang harus tertutup untuk

⁶RS, Tersangka Polsek Ujung Pandang. *Wawancara*, Polsek Ujung Pandang 24 Oktober 2018.

umum yang telah ditentukan undang-undang. Agar semua pihak dapat mengetahui apakah yang disangkakan atau didakwakan tersebut terbukti atau tidak.

Tujuannya adalah agar peradilan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Sidang dibuka untuk umum membuat masyarakat melihat langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dan menjadikan masyarakat mengetahui cara kerja penegak hukum dalam menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang.

12. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan (Pasal 65)

Tersangka atau terdakwa berhak untuk melakukan upaya pembelaan terhadap dirinya dengan mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli yang dapat membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari saksi *a de charge* dan saksi ahli yang mempunyai bukti kebenaran dan diterima oleh hakim dapat membebaskan atau paling tidak meringankan dakwaan yang dikenakan pada tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herman, selaku penyidik menyatakan bahwa:

“saksi ini biasa menjadi kendala, saksi biasa tidak mau memberikan keterangan, tidak mau memberikan kesaksian apa yang dia lihat apa yang dia ketahui.”⁷

Untuk menghadirkan saksi-saksi dalam penyidikan, baik saksi yang memberatkan maupun yang menguntungkan sangat sulit, karena tidak semua orang yang menyaksikan kejadian ingin memberikan keterangan atau kesaksian dari apa yang dia lihat.

⁷Herman, Penyidik Polsek Ujung Pandang. *Wawancara*, Polsek Ujung Pandang 24 Oktober 2018.

13. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)

Seorang tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kerena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian.

Maka berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan. Oleh karena itu penuntut umumlah yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa, atau penyidik yang bertugas berkewajiban mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan membuktikan kesalahan tersangka.

14. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68)

Tersangka, terdakwa atau terpidana yang ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Akan tetapi hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi. Hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah.

Berdasarkan uraian di atas mengenai perlindungan hukum hak tersangka dalam penyidikan, penulis menyimpulkan bahwa tersangka tidak seharusnya ditahan terlalu lama karena ketika terbukti bersalah di hadapan hakim akan mendapat hukuman penjara yang lebih lama. Penyidik seharusnya mengusahakan mencari advokat prodeo kepada tersangka yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun pada awal pemeriksaan sehingga tidak ada alasan kendala waktu pengurusan. Keluarga inti korban yang ingin bertemu sebaiknya diberikan ruang

khusus agar psikologi tersangka menjadi lebih baik karena mendapat nasihat-nasihat dari keluarga yang bisa menjadi motivasi agar lebih baik ke depannya.

C. Pelanggaran Aparat Kepolisian di Polsek Ujung Pandang Terhadap Hak Tersangka dalam Penyidikan

Bentuk pelanggaran hukum terhadap hak-hak tersangka yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya berupa pemaksaan dari penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang dilakukan. Tindakan represif seperti kekerasan fisik juga sering terjadi, misalnya tamparan pukulan, tendangan untuk memudahkan penyidik mengumpulkan alat bukti yakni keterangan tersangka, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan bahkan menyimpang dari ketentuan KUHAP.

Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut kemungkinan dalam suatu perkara terjadi beberapa bentuk pelanggaran, baik pelanggaran administratif, prosedural, maupun pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka.

1. Pelanggaran Administratif dan Prosedural

Pelanggaran administratif dan prosedural pada tingkat penyidikan dapat terjadi dalam bentuk ringan sampai dengan kasus yang tergolong pelanggaran prosedural yang berat. Beberapa jenis kasus yang tergolong ringan, dimana hak-hak asasi tersangka diabaikan secara sengaja yang disebabkan oleh tingkah laku (*law behaviour*) penyidik, ataupun karena “kerancuan” ketentuan norma dalam KUHAP maupun ketentuan pelaksanaannya.⁸ Antara lain sebagai berikut:

- a. Penyidik tidak mengusahakan hak tersangka untuk didampingi Penasehat Hukum (*Miranda Warning*).

⁸<https://wartakontraktor.wordpress.com/2011/04/03/pelanggaran-terhadap-hak-hak-tersangka-pada-tahap-penyidikan/> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2018, pukul 22.05 wita).

Pendampingan penasehat hukum merupakan pelaksanaan Pasal 1 KUHP yang biasa disebut *asas legalitas*. Subsistensi dan tujuannya yaitu, sebagai wujud perlindungan hukum atas hak-hak kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka.

Seorang tersangka dihadapan penyidik polisi saat menjawab tidak ada penasihat hukum, maka dibuatkan surat pernyataan yang intinya tidak bersedia didampingi penasihat hukum (telepas apakah ada arahan penyidik atau tidak) bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang jelas hak tersangka jika diganti dengan surat pernyataan untuk menolak penasihat hukum tidak dapat dibenarkan apapun alasannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hardono, selaku penyidik menyatakan bahwa:

“Bagi tersangka yang dikategorikan sebagai orang miskin, ini yang menjadi kendala untuk mendapatkan bantuan hukum atau penasehat hukum. Meskipun ada bantuan hukum cuma-cuma, bisa saja advokat yang memberi bantuan hukum tidak menangani secara serius atau ditangani apa adanya. Makanya dibuatkan surat pernyataan tidak didampingi penasehat hukum”⁹

Pada prinsipnya hak atas bantuan hukum diakui, tetapi tidak termasuk ke dalam hak yang bersifat wajib. Sebelum hak atas bantuan hukum menjadi wajib, ada kondisi atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Syarat khusus menyangkut kemampuan finansial, dan ancaman hukum bagi tindak pidana yang disangkakan.

Apabila ketentuan wajib tersebut diabaikan, maka akan berakibat pada tidak dapat diterimanya atau tidak sahnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dalam pertimbangannya menyebutkan:

“Apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima”.¹⁰

⁹Hardono, Penyidik Polsek Ujung Pandang. Wawancara, Polsek Ujung Pandang 23 Oktober 2018.

¹⁰Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1911 tanggal 16 September 1993.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum tidaklah mudah dilakukan, banyak kendala yang dihadapi. Kendala yang sering dialami adalah kendala dana. Kendala lain yang dihadapi seperti kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

b. Penerapan batas maksimal jangka waktu penahanan pada tahap penyidikan

Penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka. Dengan alasan untuk kepentingan penyidikan dan alasan klasik lain yang sesungguhnya dapat diantisipasi, seperti dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan menghambat proses penyidikan, penyidik menerapkan jangka waktu penahanan maksimal terhadap tersangka, sedangkan kenyataannya tersangka hanya diperiksa dalam rangka pembuatan BAP hanya beberapa kali saja dan tidak selama waktu penahanan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara RS, selaku tersangka menyatakan bahwa:

“Lama maka ditahan disini boss, adami 40 hari lebih ditahan kayak tommy acara 40 hari na orang meninggal. Tapi belum pernah dibawa pergi kejaksan untuk tahap 2.”¹¹

Keadaan seperti ini merupakan pembiaran tersangka dalam keadaan yang tidak pasti sehingga sulit untuk membedakan antara seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang sederhana, dengan tindak pidana yang rumit dan berat. Pelaksanaan penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mendominasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Jadi kelambatan penyelesaian

¹¹RS, Tersangka Polsek Ujung Pandang. *Wawancara*, Polsek Ujung Pandang 24 Oktober 2018.

perkara pidana yang disengaja oleh penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Penahanan terhadap seorang tersangka telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP perintah penahanan berdasarkan bukti yang cukup dilakukan dalam hal karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan tersangka akan mengulangi tindak pidana.

c. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penangguhan penahanan

Lembaga jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu,

“atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.”¹²

Dalam pelaksanaannya, Pasal tersebut tidak mendapatkan pengaturan lebih lanjut tentang cara pelaksanaan jaminan tersebut. Sehingga pelaksanaannya sering hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kekuasaan maupun materi.

Apabila penangguhan penahanan diberikan, maka seluruh syarat-syarat yang diwajibkan dalam penangguhan penahanan harus dipenuhi, termasuk pembayaran uang jaminan. Penangguhan penahanan harus disertai dengan syarat-syarat tertentu. Syarat diberlakukannya penangguhan penahanan yaitu; Wajib Lapori, Tidak keluar rumah, dan tidak keluar kota.

Masalah pelanggaran jangka waktu penahanan terkait penerapan batas maksimal 60 hari pada tahap penyidikan, semestinya lembaga jaminan penahanan menjadi solusi atau jalan keluar untuk menghindari pelanggaran tersebut. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka tidak perlu ditahan dalam

¹²Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 215.

jangka waktu maksimal, sedangkan hanya menjalani proses pemeriksaan beberapa hari saja.

2. Pelanggaran Terhadap Keamanan dan Kebebasan Jiwa-Raga

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap jiwa-raga seorang tersangka yang disebabkan oleh ketidakpastian ketentuan dalam KUHAP, serta akibat dari tingkahlaku penegak hukum dalam menggunakan wewenang yang berlebihan, antara lain :

a. Penangkapan

Perilaku para penegak hukum (Polisi) seringkali mengabaikan ketentuan norma-norma yang ada. Dalam proses penyidikan khususnya penangkapan, sering terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga melanggar hak asasi tersangka. Tindakan kekerasan dan penyiksaan seringkali dilakukan demi mengejar target dalam waktu yang singkat. Atau tindak penyiksaan dilakukan demi memaksa korban untuk mengakui kesalahannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara RS, selaku tersangka menyatakan bahwa:

“Waktu datang polisi mau tahan, na ambil ka baru naik diatas mobil Polisi. Baru ditutup kepada pake kain hitam jadi tidak ada bisa dilihat apa-apa. Ditembak betisku 1 kali baru dibawa ka ke Rumah Sakit Bhayangkara dikasi keluar itu peluru.”¹³

Penangkapan yang dilakukan terkadang menggunakan kekerasan dikarenakan tersangka pada saat penangkapan melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian sehingga memaksa polisi menggunakan metode penangkapan yang kasar.

¹³RS, Tersangka Polsek Ujung Pandang. *Wawancara*, Polsek Ujung Pandang 24 Oktober 2018.

b. Penahanan

Penahanan merupakan pelanggaran hak asasi tersangka yaitu hak atas kebebasan diri. Penahanan yang tidak mempertimbangkan efisiensi waktu merupakan pelanggaran hak asasi tersangka yang bersifat administratif.

Penahanan bertentangan dengan hak asasi manusia karena menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. Penahanan selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat. Anggapan berbahaya bagi masyarakat sulit dibuktikan, karena dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya bagi masyarakat itu.¹⁴

Setiap pekerjaan maupun kegiatan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh orang yang melakukan pekerjaan itu. Karena setiap orang mempunyai karakter, sikap atau sifat yang berbeda-beda. Dalam melakukan penyidikan juga pasti ada kendala-kendala yang dialami oleh penyidik. Hal-hal yang dihadapi di lapangan terkadang berbeda jauh dengan yang ada dalam undang-undang, maka pengalaman penyidik sangat berpengaruh dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang hak-hak tersangka.

Kendala paling berat yang dihadapi adalah tersangka tidak mau mengakui perbuatannya, bahkan kadang ada tersangka yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sehingga penyidik akan bertanya kepada saksi-saksi yang dianggap mengetahui tersangka melakukan tindak pidana. Hal-hal atau proses seperti itu yang sangat menguras tenaga dan pikiran penyidik.

¹⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 163.

D. Perlindungan Hak Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam telah menyediakan jaminan-jaminan bagi tersangka, baik pada tahap penyelidikan/penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan.¹⁵

Pertama, jaminan untuk kepentingan tertuduh adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan atau pengeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah penyelidikan/pengeledahan yang dikeluarkan oleh *wali al-Mazalim*¹⁶ (Kementerian Pengaduan) dan bukan dari orang lain.
2. Dikeluarkannya surat tersebut diatas tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu.
3. Bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan/pengeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum (*lawfull*). Jika sebaliknya, harus diabaikan.
4. Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka wanita dia tidak di izinkan dalam situasi bagaimanapun untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu.

Jaminan terhadap kepentingan tersangka di Polsek Ujung Pandang telah terlaksana, pada saat penyelidikan maupun pengeledahan penyidik telah membuat surat perintah penyelidikan/pengeledahan walaupun tidak dikeluarkan

¹⁵Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asy Syamsil Press & Grafika, 2001), h. 59.

¹⁶*Wali al-Mazalim* di awal negara Islam adalah suatu posisi yang lebih tinggi daripada jabatan hakim. *Wali al-Mazalim* berhak untuk menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh hakim karena kedudukan yang tinggi dari salah satu atau kedua pihak. Secara umum, *Wali al-Mazalim* bertugas memperbaiki segala macam ketidakadilan dalam Negara Islam. Ahmad Agus Ramdlany, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Pidana Islam, Tesis* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), h. 49

oleh *wali al-mazalim* karena tidak menggunakan hukum Islam namun pada dasarnya prinsip yang digunakan sama dengan yang terdapat pada hukum acara pidana. Pada saat menggeledah seorang tersangka perempuan diutamakan yang menggeledah adalah penyidik perempuan sehingga tidak terjadi fitnah atau pelanggaran asusila oleh penyidik.

Kedua, jaminan pada saat penahanan (*preventive detention*):

1. Penahanan itu tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh *wali al-Mazalim* atau *al-Muhtasib*¹⁷.
2. Pada saat kasus itu diserahkan pada hakim, dia menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menentukan pantasnya penahanan dan pelepasan.
3. Penahanan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan-kejahatan dalam derajat keseriusan tertentu (seperti pembunuhan, penganiyaan dan sebagainya).
4. Penahanan harus mempunyai jangka waktu. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa periodenya adalah satu bulan dan yang lainnya berpendapat kurang dari itu. Ahli hukum lainnya berpendapat bahwa periode ini merupakan diskresi dari imam.

Mengenai lamanya penahanan, para Ulama berbeda pendapat. Al-Mawardi, Abu Ya'la dan lainnya menyebutkan dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu: Al-Zubairy mengatakan bahwa lamanya penahanan ialah satu bulan, dan Al-Mawardi

¹⁷*Al-Muhtasib* adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh imam untuk menjamin penegakan secara benar dari ketentuan-ketentuan spiritual syariat Islam dan menangkap semua pelanggaran terhadap aturan-aturan umum Islam dan menghukum pelanggarnya. Kedudukannya di bawah hakim dan *wali al-Mazalim*. Ahmad Agus Ramdlany, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Pidana Islam*, Tesis, h. 49

mengatakan bahwa tidak ada ketentuan waktu lamanya penahanan atau diserahkan pada hakim atau pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan.¹⁸

Jaminan hak tersangka pada saat penahanan telah terlaksana karena surat perintah penahanan telah dibuat oleh penyidik walaupun tidak dibuat oleh *wali al-Mazalim* atau *al-Muhtasib*. Mengenai jangka waktu penahanan telah ditentukan jangka waktu penahanan maksimal saat penyidikan selama 20 hari dan apabila masa penahanan habis maka penyidik mengajukan perpanjangan masa penahanan di Kejaksaan semalam 40 hari. Apabila kejahatan yang dilakukan tergolong tindak pidana ringan maka tidak dilakukan penahanan oleh penyidik namun langsung dilimpahkan ke pengadilan dan hukumannya diputus oleh hakim.

Ketiga, jaminan pada saat interogasi sebagai berikut:

1. Interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk dilakukannya dengan wajar dan adil. Pejabat-pejabat ini dalam hukum Islam adalah *wali al-Muzalim* dan *al-Muhtasib*.
2. Dalam kejahatan *hudud* dan *qishas*, petugas yang melakukan interogasi tidak di izinkan untuk memaksa/mewajibkan sumpah dari terdakwa ketika dia dihadapkan dengan bukti untuk melawannya. Memaksakan sumpah yang sangat tinggi nilainya bagi muslim dapat mempengaruhi terdakwa untuk mengatakan hal-hal yang bertentangan dengannya sendiri dan tidak benar.
3. Dalam kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qishas* terdakwa di izinkan untuk melawannya. Para *fuqaha'* berpendapat bahwa kesalahan dalam kejahatan tersebut harus dibuktikan dengan cara-cara pembuktian yang ditentukan

¹⁸Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam, Judul Asli "Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah"* diterjemahkan oleh Adnan Qohar dan Anshoruddin (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 184.

dalam syariat Islam dan diamnya terdakwa bukan salah satu dari cara pembuktian itu.

4. Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari bentuk perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk apapun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman, dan sebagainya). Mayoritas sarjana muslim mengatakan bahwa pengakuan yang dinyatakan oleh terdakwa harus atas kehendaknya sendiri.
5. Syariat Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya, kekeliruannya, dan kesembroannya sendiri. Syariat mengatur bahwa pernyataan dan jawaban-jawaban yang diberikan terdakwa harus diulanginya sebanyak jumlah saksi yang dipersyaratkan oleh syariat. Jadi, terdakwa memiliki kesempatan untuk menarik pengakuannya.

Jaminan hak tersangka pada saat interogasi seperti pejabat yang melakukan interogasi telah sesuai dengan penerapan hukum Islam walaupun pejabatnya bukan dari *wali al-Mazalim* dan *al-Muhtasib* karena penyidik telah memiliki reputasi khusus dan dilakukan dengan wajar dan adil serta sifat tidak berpihak. Interogasi yang dilakukan tidak memaksa/mewajibkan tersangka untuk sumpah terhadap bukti-bukti yang digunakan untuk melawannya. Penyidik sendirilah yang harus mencari bukti-bukti tanpa membebankan kepada tersangka karena tersangka memiliki hak untuk tidak dibebani pembuktian.

Keempat, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut:

1. Hak untuk membela diri

Hak untuk membela diri memungkinkan terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti alibi). Perlunya hak untuk membela

diri menjadi jelas tatkala kita sadari bahwa suatu tuduhan yang tidak dibantah oleh tertuduh menjadi suatu bukti bahwa ia bersalah.¹⁹

Hak untuk membela diri diadakan oleh hukum Islam. Penasihat hukum berperan aktif dalam mendampingi tersangka/terdakwa, berbeda dengan hukum barat, peran penasihat hukum bersifat pasif, sehingga peluang terjadinya pelanggaran HAM sangat besar. Tanpa hak-hak itu, hak untuk membela diri menjadi tidak ada artinya.

2. Hak Pemeriksaan Pengadilan (*the right to judicial trial*)

Dengan tujuan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, Islam telah meletakkan hak, jika terdakwa diadili di muka pengadilan dan diadili secara terbuka.²⁰

Dalam suatu persidangan, hakim tidak boleh bersikap *prejudice* (prasangka) terhadap terdakwa. Terdakwa berhak dilayani seperti biasa dan tidak boleh dianggap sudah bersalah walaupun dia sedang berada dalam tahanan. Hakim mesti menghindari sikap seolah-olah dia tidak menyukai tersangka/terdakwa, hakim tidak boleh membuat keputusan dalam keadaan marah. Sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah saw. dalam sebuah riwayat:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسَجِسْتَانَ بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْضَيْنَ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (رواه البخاري) ²¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umair, aku

¹⁹Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas*, h. 62.

²⁰Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas*, h. 62.

²¹Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 7 (Jakarta: Pustaka Assunnah, 1987), h. 128.

mendengar Abdurrahman bin Abu Bakrah mengatakan, Abu Bakrah menulis surat untuk anaknya yang ketika itu berada di Sijistan yang isinya; *'Jangan engkau mengadili diantara dua orang ketika engkau marah, sebab aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Seorang hakim dilarang memutuskan antara dua orang ketika marah."* (HR. Bukhari).

Seorang hakim atau pemimpin hendaklah bijak dalam membuat keputusan.

Jika ada perseteruan antara dua pihak, maka alangkah baiknya jika hakim itu tidak terbawa emosi dan memutuskan perkara antara mereka dengan kepala dingin.

Hal ini sesuai dalam QS. al-Maidah/5:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ؕ اْعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²²

Ayat ini menyatakan bahwa adil lebih dekat kepada takwa. Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil anda dapat mencurahkan kasih kepadanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperanan karena ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan Hukum atasnya. Ketika itu, yang dituntut adalah adil yakni menjatuhkan hukuman yang setimpal atasnya.²³

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Paralel Indonesia Inggris* (Solo: Qomari, 2010), h. 108.

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2001), h. 39.

Berlaku adillah kamu baik terhadap lawan maupun terhadap kawan karena hal itu artinya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan sehingga kamu akan menerima pembalasan daripadanya.²⁴

3. Hak atas Peradilan yang adil dan tidak memihak

Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya dihadapan mereka yang memutuskan perkara. Menurut syariat Islam, semua orang di hadapan hukum adalah sama. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, kaya dan miskin, penguasa dan rakyat jelata.

Prinsip *equality before the law*, bukan sekedar teori dalam hukum pidana Islam, tetapi sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah saw. Ketika ada seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah (Suku yang terpandang waktu itu) yang tertangkap mencuri, Kabilah tersebut memohon kepada Rasulullah saw. agar dibebaskan dari hukuman. Mereka meminta bantuan sahabat Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat yang disayangi Rasulullah saw. sebagai perantara mereka. Rasulullah saw. menolak permohonan tersebut dengan murka seraya berkata:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. (رواه البخاري)²⁵

Artinya:

Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kamu adalah, jika yang mencuri itu orang mulia, mereka membebaskannya, dan jika yang mencuri orang yang hina, mereka menjatuhkan hukuman atasnya. demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad (putri beliau sendiri) itu mencuri, niscaya Muhammad sendiri yang akan memotong tengannya. (H.R Bukhari).

²⁴M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, h. 40.

²⁵Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 7 (Jakarta: Pustaka Assunnah, 1987), h. 239.

Ketika menjelaskan hadits ini, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullah berkata, "Inilah keadilan". Inilah penegakkan hukum Allah, yaitu bukan atas dasar mengikuti hawa nafsu. Rasulullah bersumpah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri –dan Fatimah tentu lebih mulia secara nasab dibandingkan dengan wanita bani Makhzum tersebut karena Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga- maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri yang akan memotong tangannya." Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullah melanjutkan, "Demikianlah, wajib atas pemimpin (pemerintah) untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Mereka tidak boleh memihak seorang pun karena hubungan dekat, kekayaannya, kemuliaannya di masyarakat (kabilah/sukunya), atau sebab lainnya".²⁶

Hakum harus ditegakkan, tidak ada orang yang boleh lepas dari hukum sekalipun dia seorang yang berkuasa dan memerintah. Demi menegakkan hukum bahkan Rasulullah akan menghukum anaknya sendiri apabila terbukti bersalah tanpa membedakan dengan orang lain.

4. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah

Jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak sengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari *baitul maal* (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada wali *al-Muzalim*. Apabila hakim sengaja bertindak tidak adil dan mengeluarkan putusan yang tidak adil untuk keuntungan seseorang karena dia terhormat, kaya atau berkuasa, hakim itu harus dihukum dengan pemecatan dan korban berhak atas ganti rugi dari hakim tersebut.²⁷

²⁶<https://muslim.or.id/23872-penegakkan-hukum-di-masa-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html> (diakses pada tanggal 06 November Pukul 08.45 wita)

²⁷Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas*, h. 63.

5. Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan

Hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substantif dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan yang belum dapat dihilangkan harus menjadi keuntungan bagi terdakwa, bukan merugikannya. Dengan demikian, keraguan itu dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghukuman harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

Efek dari sanksi yang diberikan pada pelaku kejahatan diharapkan akan melahirkan efek jera, sehingga mampu mencegah terulangnya kejahatan yang sama, baik oleh pelaku atau orang lain yang akan bertindak jahat. Dengan demikian akan melahirkan rasa aman dalam masyarakat. Selain itu, penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan akan meringankan pertanggungjawaban pelaku diakhirat kelak. Semua hak tersangka harus dilindungi dan diberikan sesuai aturan yang ada karena belum tentu seorang tersangka benar-benar melakukan suatu tindak pidana.

Kurangnya perhatian aparat hukum berkaitan dengan hukum pidana Islam menjadikannya luput dari ketentuan yang diatur agama. Sehingga melakukan pelanggaran etika terhadap tersangka yang belum tentu bersalah karena belum adanya putusan dari hakim. Padahal hukum Islam memiliki standar hukum yang pasti, tegas, konsisten dan tidak berubah karena bersumber pada QS. al-Hujurat/49:12 dalam BAB I dan Sunnah Rasul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum hak tersangka di Polsek Ujung Pandang Makassar belum terlaksana secara optimal, karena tidak semua tersangka memperoleh haknya saat penyidikan maupun penahanan. Kondisi seperti ini menjadi kesewenang-wenangan penyidik dalam memeriksa tersangka.
2. Bentuk pelanggaran hukum terhadap hak-hak tersangka yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya berupa pemaksaan dari penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang dilakukan. Tindakan represif seperti kekerasan fisik juga sering terjadi, misalnya tamparan pukulan, tendangan untuk memudahkan penyidik mengumpulkan alat bukti yakni keterangan tersangka, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan bahkan menyimpang dari ketentuan KUHAP.
3. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan hak asasi tersangka maupun terdakwa diberikan pada semua tahapan proses yang dilalui oleh tersangka atau terdakwa. Hukum pidana Islam memiliki standar hukum yang pasti, tegas, konsisten, dan tidak berubah karena bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Lembaga peradilan dalam sistem peradilan pidana Islam lebih sederhana namun saling terkait dan memiliki wewenang serta syarat yang tegas.

B. Implikasi Penelitian

1. Diharapkan pejabat yang berwenang menjelaskan hak-hak tersangka sebelum diadakan pemeriksaan, agar hak tersangka terlindungi ditingkat penyidikan dan berjalan dengan optimal.

2. Aparat penegak hukum harus menghentikan segala bentuk penyalahgunaan wewenang kekuasaannya. Kekerasan, penyiksaan maupun penganiayaan yang dilakukan secara fisik maupun mental harus dihentikan. Aparat harus menjaga dan menghormati HAM setiap warga negara, termasuk HAM tersangka atau terdakwa.
3. Perlu adanya kebijakan untuk menggali dan menghormati nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, terutama hukum Islam sebagai agama yang mayoritas dianut di Indonesia sebagai bahan untuk pembentukan hukum yang lebih manusiawi dan menghargai HAM. Adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan bahan hukum yang bisa menciptakan hukum yang akomodatif dan efektif dalam pelaksanaannya di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Sahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 1407H/1987.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam, Judul Asli "Al-Tharuq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah"*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Atmadja, Bambang Iriana Djaja. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*. Bandung: Binacipta, 1996.
- Baecher, Peter R, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Budiardjo, Mariam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif. Cet. 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Darmodihardjo, Darji. *Santiaji Pancasila*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991.
- Efendi, Jonaedi dan Suharto. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: IKAPI JATIM, 2014.
- Kurniati. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Suatu Analisis Komparatif antara HAM dalam Islam dengan HAM Konsep Barat*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2005.
- Mas'udi, Masdar F. *Agama dan Hak Rakyat cet. I*. Jakarta: Guna Aksara, 1993.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1911 tanggal 16 September 1993.
- Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta : Prenamedia Grup, 2014.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- _____. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

- _____. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- _____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- _____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Rover, C. de. *To Serve and To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sanad, Nagaty, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law: Saria*. Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syamsil Press & Grafika, 2001.
- Shihab, H. Umar. *Alquran dan Rekayasa Sosial, Cet. I*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sri Mujiono, Agus. *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana, Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah : Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Laporan Penelitian*. Makassar : Alauddin Press, 2013.
- Tumpa, Harifin A. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Makassar: Prenada Media, 2009.
- <https://risalahmuslim.id/larangan-memutuskan-perkara-saat-marah/>
- <https://wartakontraktor.wordpress.com/2011/04/03/pelanggaran-terhadap-hak-hak-tersangka-pada-tahap-penyidikan/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa Gowa
 Tlp. (0411) 424835 Fax. 424836

Nomor : B-3334 /SH.01/PP.00.9/10/2018

Samata, 12 Oktober 2018

Lamp : 1 (Satu) Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ka. Polsek Ujung Pandang
di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama : Warits Deen Muhammad Wahyu
 Nim : 10200114254
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Jl. Mustafa Dg. Bunga Kab. Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :


"Perlindungan Hukum Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Lapangan Polsek Ujung Pandang Makassar)"

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Halimah B, M. Ag
 2. Dr. Alimuddin, M. Ag

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Polsek Ujung pandang terhitung mulai tanggal 15 Oktober s/d 15 November 2018.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan


Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
 NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAN

Pekerjaan : ANGGOTA POLRI

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 2 Makassar

Menyatakan bahwa :

Nama : Warits Deen Muhammad Wahyu

NIM : 10200114254

Pekerjaan : Mahasiswa

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana & Ketatanegaraan


Alamat : Romang Polong, Kab. Gowa

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM." (Studi Lapangan Polsek Ujung Pandang Makassar).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Samata, 24 Oktober 2018

Responden


Herman

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARDONO
 Pekerjaan : ANGGOTA POLRI
 Alamat : Jl. SULTAN HASANUDDIN No.3. Makassar

Menyatakan bahwa :

Nama : Warits Deen Muhammad Wahyu
 NIM : 10200114254
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana & Ketatanegaraan
 Alamat : Romang Polong, Kab. Gowa

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM." (Studi Lapangan Polsek Ujung Pandang Makassar).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Samata, Oktober 2018

Responden


 HARDONO



(Wawancara Penyidik : Herman, tanggal 24 Oktober 2018)



(Wawancara Penyidik : Hardono, tanggal 23 Oktober 2018)



(Wawancara Tahanan : RS alias Rais Syarifuddin, tanggal 24 Oktober 2018)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



WARITS DEEN MUHAMMAD WAHYU , dilahirkan di Kab. Sidenreng Rappang, Kec. Maritenggae, Kel. Rijang Pittu. Pada hari Selasa, 05 November 1996. Merupakan anak Pertama dari Lima bersaudara, pasangan dari Syahrudin Sanusi dan Nursiah Roe. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 8 Pangsid di Kecamatan Meritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Pangsid dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 1 Sidenreng Kab. Sidenreng Rappang dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK). Penulis menyelesaikan kuliah sarjana (S1) pada tahun 2018.